Katalog: 4102004.1373

NDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SAWAHLUNTO 2020/2021





NDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SAWAHLUNTO 2020/2021



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SAWAHLUNTO 2020/2021

ISSN: 2808-0653

No. Publikasi: 13730.2112 Nomor Katalog: 4102004.1373

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm Jumlah Halaman: xvi+74 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto

Desain Kover:

Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto

Dicetak Oleh:

CV Demy (cetakan:I)

Ilustrasi Kover:

Camping Ground Kandi Kota Sawahlunto

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b).

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SAWAHLUNTO 2020/2021

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Yerison Buchari, SST, M.Si

Penulis : Desevaria, SST

Ichlisa Amalia Andri, S.Tr.Stat

Pengolah Data : Desevaria, SST

Elsa Kamelina, S.Si

Penyunting: Yerison Buchari, SST, M.Si

Desevaria, SST

Halaman Depan : Ichlisa Amalia Andri, S.Tr.Stat

Infografis : Ichlisa Amalia Andri, S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Sawahlunto 2020/2021 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Sawahlunto antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Sawahlunto, Desember 2021 Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto

YERISON BUCHARI, SST, M.Si

enjorm

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	V
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xiii
Singkatan dan Akronim	xv
Bab I Kependudukan	1
Bab II Kesehatan dan Gizi	
Bab III Pendidikan	25
Bab IV Ketenagakerjaan	35
Bab V Taraf dan Pola Konsumsi	43
Bab VI Perumahan dan Lingkungan	51
Bab VII Kemiskinan	59
Bab VIII Sosial Lainnya	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto, 2018-2020	3
Tabel 1.2	Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Sawahlunto Menurut Kecamatan, 2020	4
Tabel 1.3	Jumlah Kelahiran, Kematian,Penduduk Datang dan Penduduk Pindah di Kota Sawahlunto Menurut Kecamatan, 2020	6
Tabel 1.4	Jumlah, Persebaran, dan Kepadatan Penduduk Kota Sawah- lunto Menurut Kecamatan, 2020	7
Tabel 1.5	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Kota Sawahlunto, 2016-2020	8
Tabel 1.6	Persentase perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Kawin dan Pernah/Sedang Menggunakan Alat KB di Kota Sawahlunto, 2018-2020	12
Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan TerakhirMenurut Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto, 2020	19
Tabel 2.2	Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan di Kota Sawahlunto, 2019-2020	21
Tabel 2.3	Persentase penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kota Sawahlunto, 2019-2020	22
Tabel 2.4	Persentase penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan di Kota Sawahlunto, 2020	23

Tabel 3.1	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Angka Parisipasi Kasar Sekolah di Kota Sawahlun- to, 2019-2020	29
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni di Kota Sawahlunto, 2018-2020	31
Tabel 3.3	Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Keatas di Kota Sawahlunto, 2020	33
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto (Persen), 2018-2020	38
Tabel 4.2	Penduduk 15 tahun ke Atas yang Termasuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Sawahlunto, 2020	40
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Beker- ja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan di Kota Sawahlunto, 2020	42
Tabel 5.1	Perkembangan Pengeluaran Rata-rata Perkapita/Bulan di Kota Sawahlunto, 2019-2021	46
Tabel 5.2	Distribusi Pengeluaran Penduduk per Kapita di Kota Sawah- lunto (Persen), 2019-2021	47
Tabel 5.3	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kota Sawahlunto, 2020	50

Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Perumahan di Kota Sawahlunto, 2019-2020	54
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan di Kota Sawahlunto, 2019-2020	56
Tabel 7.1	Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Sawahlunto, 2016- 2021	62
Tabel 7.2	Beberapa Indikator Penduduk miskin di Kota Sawahlunto, 2018-2021	63
Tabel 8.1	Persentase Indikator Sosial lainnya di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2020	67
Tabel 8.2	Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas yang Memiliki/Menguasai Teknologi Informasi di Kota Sawahlunto, 2020	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1		Perbandingan Persentase Luas Wilayah dan Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Sawahlun- to (Persen), 2020	5
Gambar 1	1.2	Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Sawahlunto, 2016-2020	9
Gambar 1	1.3	Wanita Pernah Kawin Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kota Sawahlunto (persen), 2019-2020	11
Gambar 1	1.4	Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan di Kota Sawahlunto, 2019-2020	13
Gambar 2	2.1	Angka Kesakitan di Kota Sawahlunto, 2018-2020	18
Gambar 2	2.2	Umur Harapan Hidup di Kota Sawahlunto, 2016-2021	20
Gambar 3	3.1	Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto, 2016-2021	30
Gambar 4	4.1	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Sawahlunto, 2020	41
Gambar 5	5.1	Indeks Gini Ratio Kota Sawahlunto, 2016-2020	49
Gambar 6	5.1	Status Kepemilikan Rumah di Kota Sawahlunto (Persen), 2020	57

Gambar 8.1	Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha di Kota Sawahlunto, 2017-2020	69
Gambar 8.2	Persentase Penduduk 5 Tahun Ke atas yang Memakai dan Akses Teknologi Informasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto, 2020	72
Gambar 8.3	Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke atas yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto, 2018-2020	73
Gambar 8.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Barang dan Jenis Barang yang dimiliki di Kota Sawahlunto, 2020	74

SINGKATAN DAN AKRONIM

APM Angka Partisipasi Murni

APS Angka Partisipasi Sekolah

ASI Air Susu Ibu

ASFR Age-Specific Fertility Rate

BPS Badan Pusat Statistik

KB Keluarga Berencana

Sakernas Survei Angkatan Kerja Nasional

SD Sekolah Dasar

SMP Sekolah Menengah Pertama

SP Sensus Penduduk

Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional

TPAK Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPT Tingkat Pengangguran Terbuka

SDGs Sustainable Development Goals

BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

UKBM Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat

AMH Angka Melek Huruf

APK Angka Partisipasi Kasar

IPM Indeks Pembangunan Manusia

TSP Tingkat Setengah Pengangguran

GK Garis Kemiskinan

ART Anggota Rumah Tangga

KRT Kepala Rumah Tangga

Kerendudukan



Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto tahun 2020

> 65.138 **Jiwa**

50,30%

Laki-laki

Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto berdasarkan kelompok umur. 2020

15-64 tahun

0-14 tahun





25,23%

66

67,80%

6,97%

dengan rasio ketergantungan sebesar:

Setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 47 orang penduduk tidak produktif

KEPENDUDUKAN

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2020 adalah 65.138 jiwa meningkat dibandingkan tahun 2019 (62.524 jiwa) dengan laju pertumbuhan 1,40 persen per tahun. Laju pertumbuhan menunjukkan angka positif serta menunjukkan kecenderungan yang meningkat yaitu dari 0,81 persen di tahun 2018 menjadi 1,01 persen di tahun 2019 dan 1,40 persen di tahun 2020.

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto, 2018-2020

Tahun	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk
(1)	(2))	(3)
2018	.429	61.898	0,81
2019		62.524	1,01
2020		65.138	1,40

Sumber: Proyeksi Penduduk SP2010 dan Hasil SP2020

Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin.

Penduduk Kota Sawahlunto lebih didominasi oleh penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin penduduk di tahun 2020 adalah sebesar 101,22

artinya secara rata-rata dalam setiap seratus orang penduduk wanita akan terdapat 101 penduduk laki-laki. Ada dua kecamatan yang rasio jenis kelamin penduduknya diatas 100 yaitu Kecamatan Silungkang dan Talawi sebesar 102,47 dan 102,75 persen, hal ini berarti diantara 100 penduduk wanita ada 2,47 dan 2,75 penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk wanita.

Tabel 1.2 Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Sawahlunto Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	Jum	Rasio Jenis		
Recalliatali	Laki- laki	Wanita	Jumlah	Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Silungkang	5.774	5.635	11.409	102,47
Lembah Segar	6.672	6.680	13.352	99,88
Barangin	10.138	10.146	20.284	99,92
Talawi	1.083	9.910	20.093	102,75
Kota Sawahlunto	32.767	32.371	65.138	101,22

Sumber: Hasil SP2020

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu permasalahan yang dihadapi dengan meningkatnya jumlah penduduk yaitu masalah persebaran penduduk yang tidak merata sehingga berdampak pada kepadatan penduduk yang semakin bertambah. Konsentrasi penduduk yang tinggi pada suatu wilayah di satu sisi dapat memudahkan dalam pelayanan sosial, namun jika telah melebihi kapasitas lingkungan dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat meningkatkan kerawanan sosial jika tidak didukung oleh pertumbu-

han ekonomi wilayah yang tinggi pula. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk di Kota Sawahlunto pada tahun 2020 secara rata-rata kepadatan 238,21 per jiwa per kilo meter persegi.

% %Luas Wilayah %%Penduduk 36,35 40 30,85 35 30 19,23 20,5 25 17,51 20 15 10 5 Silungkang Lembah Segar Barangin Talawi

Gambar 1.1 Perbandingan Persentase Luas Wilayah dan Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Sawahlunto (Persen), 2020

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka, 2021

Kepadatan penduduk di Kota Sawahlunto belum merata. Beberapa kecamatan dengan luas wilayah yang besar, jumlah penduduknya cukup rendah seperti Kecamatan Talawi dan Kecamatan Barangin. Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Lembah Segar berada dalam kondisi yang sebaliknya, dengan luas wilayah yang paling kecil kepadatan penduduknya melebihi dari luas wilayah. Hal ini disebabkan Kecamatan Silungkang merupakan jalur lintas Sumatera dan Kecamatan Lembah Segar merupakan ibukota Sawahlunto dan merupakan pusat pemukiman dan perekonomian. Dari gambar 1.1 terlihat luas wilayah dan persentase jumlah penduduk dua kecamatan melebihi persentase luas wilayah yaitu Kecamatan Silungkang dan Lembah Segar mas-

ing-masing dengan persentase jumlah penduduknya 17,51 dan 20,50 pesen dan luas wilayah 12,04 dan 19,23 persen.

Tabel 1.3 Jumlah Kelahiran, Kematian, Penduduk Datang dan Penduduk Pindah di Kota Sawahlunto Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	Kelahiran	Kematian	Penduduk Datang	Penduduk Pindah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Silungkang	196	77	173	250
Lembah Segar	214	94	238	321
Barangin	355	110	390	402
Talawi	360	121	318	366
Kota Sawahlunto	1125	402	1119	1339

Sumber: Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2021

Dari Tabel 1.3 jumlah kelahiran paling tertinggi di Kecamatan Talawi dan terendah di Kecamatan Silungkang, tingkat kematian yang tertinggi di Kecamatan Talawi dan terendah Kecamatan Silungkang, penduduk datang dan penduduk pindah tertinggi berada di Kecamatan Barangin sedangkan untuk penduduk datang dan penduduk pindah yang terendah ada di Kecamatan Silungkang.

Tabel 1.4 Jumlah, Persebaran, dan Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	Jumlah Pen- duduk	Persebaran Penduduk	Kepadatan penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
Silungkang	11.409	17,52	346,46
Lembah Segar	13.352	20,50	253,94
Barangin	20.284	31,14	229,07
Talawi	20.093	30,85	202,16
Kota Sawahlunto	65.138	100,00	238,21

Sumber: Hasil SP2020

Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Silungkang, kemudian diikuti oleh Kecamatan Lembah Segar. Silungkang merupakan daerah perlintasan antar kabupaten/kota, sedangkan Lembah Segar merupakan pusat ibu kota juga memiliki berbagai macam fasilitas dan merupakan wilayah ibu kota/perekonomian kota. Selanjutnya, kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Talawi. Terlihat adanya kecederungan yaitu daerah perkotaan memiliki kepadatan penduduk relatif lebih tinggi, sedangkan daerah perdesaan memiliki kepadatan penduduk lebih rendah.

Angka Beban Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan banyak hal diantaranya tingkat produktivitas penduduk serta tingkat konsumsi penduduk. Dilihat dari sisi konsumsi, penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun membutuhkan pelayanan sosial dan fasilitas

umum yang lebih besar seperti pelayanan kesehatan serta pendidikan. Dari sisi produktivitas, penduduk pada kelompok umur tersebut masih rendah, sehingga secara umum tingkat konsumsi akan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi yang mampu dihasilkan. Begitu pula dengan penduduk yang ada pada kelompok umur diatas 65 tahun, dengan produktivitas yang secara umum mulai menurun, mereka membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Sebaliknya untuk penduduk pada kelompok usia 15-64 tahun yang produktivitasnya secara rata-rata akan lebih tinggi dibandingkan konsumsinya, sehingga semakin besar jumlah penduduk pada kelompok umur ini relatif terhadap kelompok umur lainnya, berpeluang untuk meningkatkan produktivitas di suatu wilayah.

Tabel 1.5 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Kota Sawahlunto, Tahun 2016-2020

Tahun	Kelompok Umur (Tahun)		Rasio Ketergantungan	
Tahun	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	28,63	65,02	6,35	53,79
2017	28,40	65,10	6,50	53,61
2018	28,18	65,14	6,69	53,52
2019	27,94	65,15	6,90	53,48
2020	25,23	67,80	6,97	47,50

Sumber: Proyeksi Penduduk SP2010 dan Hasil SP2020

Proporsi penduduk umur produktif di Kota Sawahlunto pada tahun 2020 adalah yang terbesar dari lima tahun sebelumnya dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 komposisi penduduk usia produktif sebesar 65,02 persen menjadi 67,80 persen di tahun 2020. Se-

mentara komposisi usia 0-14 tahun menurun 28,63 persen menjadi 25,23 persen. Sedangkan pada komposisi penduduk usia 65 tahun keatas mengalami kenaikan dari 6,35 persen menjadi 6,97 persen. Hal tersebut menyebabkan angka beban ketergantungan penduduk Kota Sawahlunto usia tersebut terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Secara umum, angka beban ketergantungan tahun 2016-2019 dikisaran 53-54 persen, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 47,50 persen.



Gambar 1.2 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Sawahlunto, 2016-2020

Angka beban ketergantungan pada tahun 2020 sebesar 47,50 berarti

setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 47 orang penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan lansia. Menurunnya angka beban ketergantungan juga dapat menggambarkan bahwa jumlah penduduk produktif yang semakin meningkat relatif terhadap jumlah penduduk yang tidak produktif. Jika kecenderungan penurunan angka beban ketergantungan terus berlangsung, maka diharapkan Indonesia akan segera mencapai fase ketika rasio ketergantungan mencapai titik terendah (windows of opportunity).

Angka beban ketergantungan juga dapat menunjukkan tanda-tanda adanya bonus demografi yaitu angka ketergantungan di bawah 50 yang berarti bahwa satu orang penduduk tidak produktif ditanggung oleh 1-2 orang penduduk produktif. Seperti diketahui bahwa bonus demografi terjadi apabila mayoritas penduduk Indonesia adalah usia angkatan kerja 15-64 tahun, dimana penduduk pada kelompok ini menjadi potensial bagi Indonesia untuk menjadi negara maju apabila sumber daya manusianya berkualitas. Sebaliknya, akan menjadi bumerang jika kualitas sumber daya manusia penduduk produktif itu rendah (*Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035).

Perkawinan

Salah satu yang dapat memicu pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020, persentase wanita Kota Sawahlunto berusia >10 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya

pada usia <16 tahun sebesar 4,49 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,84 persen. Sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama pada usia 24 tahun ke atas dan persentasenya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 57,05 persen pada tahun 2019 turun menjadi 55,83 persen pada tahun 2020. Sementara itu, wanita yang melakukan perkawinan pertama pada tahun 2020 di usia 17-18 tahun mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu dari 13,52 persen menjadi 15,71 persen. Untuk rentang usia 19-20 tahun mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2019 mencapai 22,58 persen menjadi 23,96 persen di tahun 2020.

■ 2019 ■ 2020 57,05 55,83 60 50 40 30 22,58 23,96 13,52 15,71 20 6,84 10 0 <16 17-18 19-20 24+

Gambar 1.3 Wanita Pernah Kawin Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kota Sawahlunto (persen), 2019-2020

Sumber: Kota Sawahlunto dalam Angka, 2019-2020

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018-2020, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sebesar 47,72 persen pada tahun 2019 dan menurun menjadi 44,90 persen pada tahun 2020. Grafik memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan dan pil yang paling banyak diminati.

Tabel 1.6 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Kawin dan Pernah/Sedang Menggunakan Alat KB di Kota Sawahlunto, 2018-2020

Pernah/Tidak Memakai Alat KB	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Pernah	13,49	14,98	17,80
Sedang	44,12	47,72	44,90
Tidak pernah menggunakan	42,39	37,35	37,29

Sumber: Susenas 2018-2020

Penggunaan alat KB yang banyak dipakai pada tahun 2020 yaitu suntikan, pil, AKDR/IUD/spiral, dan susuk KB masing-masing sebesar 44,47, 16,84, 15,93 dan 11,22 persen. Penggunaan alat KB berupa pil mengalami ke-

naikan yang paling besar dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 2,47 persen, diikuti MOW/Tubektomi sebesar 1,81 persen dan AKDR/IUD/Spiral sebesar 1,72 persen. Sedangkan penggunaan susuk KB mengalami penurunan terbesar sebesar 4,76 persen dari 15,98 menjadi 11,22 persen di tahun 2020, diikuti dengan penurunan alat KB kondom sebesar 1,1 persen. Kemudian tidak ada penduduk perempuan berumur 15-94 tahun yang menggunakan alat KB metode menyusui alami.

Lainnya 0.49 Pantang Berkala 1,02 0,58 Metode Menyusui Alami Intravag/ 0,03 Kondom Perempuan Kondom 1,71 0.61 Pil Susuk KB 15,98 Suntikan 44.02 AKDR/IUD/ 14 21 Spiral MOP/ Vasektomi MOW/ Tubektomi 0 10 20 30 40 50 2019 2020

Gambar 1.4 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan di Kota Sawahlunto, 2019-2020

Sumber: Susenas, 2019-2020

2

Kesehatan & Gizi

UHH Kota Sawahlunto tahun 2021:



70,10

Secara rata-rata bayi yang dilahirkan pada tahun 2021 dapat hidup selama

70,10 tahun

Persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan pada 2020 mencapai 100%







J,

KESEHATAN DAN GIZI

2

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian yaitu tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik, seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari seperti bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).



Gambar 2.1 Angka Kesakitan di Kota Sawahlunto, 2018-2020

Sumber: Susenas, 2018-2020

Hasil Susenas tahun 2020 menunjukkan penduduk Kota Sawahlunto yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 33,42 persen, yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan berobat jalan ada 56,45 persen, dan yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan ada sebanyak 14,94 persen.

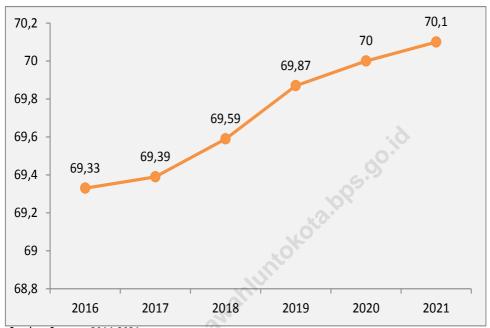
Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto, 2020

		Jenis Kelamin		
Indikator	Laki-laki	Perempuan	Lak-laki + Perem- puan	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan	29,69	37,12	33,42	
Persentase penduduk yang mengalami keleuhan kesehatan dan berobat jalan	55,65	57,09	56,45	
Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan	13,01	16,85	14,94	

Sumber: Susenas 2020

Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup penduduk Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan dari 69,33 di tahun 2016 menjadi 70,10 di tahun 2021. Ini berarti bahwa secara rata-rata bayi yang dilahirkan pada tahun 2021 dapat hidup selama 70,10 tahun. Meningkatnya angka harapan hidup penduduk mengindikasikan semakin baiknya taraf kesehatan penduduk.



Gambar 2.2 Umur Harapan Hidup di Kota Sawahlunto, 2016-2021

Sumber: Susenas, 2016-2021

Pemanfaatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres

No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Tabel 2.2 Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Di Kota Sawahlunto, 2019-2020

Indikator	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Persentase balita menurut penolong persalina	an	
Tenaga Kesehatan	9	
Dokter	65,76	64,05
Bidan	33,66	33,65
Lainnya	0,00	2,30
Bukan Tenaga Kesehatan		
Dukun Beranak	0,57	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber: Susenas 2019-2020

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2020 mencapai 100 persen artinya tidak ada lagi penolong persalinan tenaga dukun bayi di Kota Sawahlunto.

Peningkatan perubahan sikap masyarakat yang lebih baik tersebut ditandai dengan banyaknya penduduk yang melakukan persalinan ke dukun beranak pada tahun 2019 sebesar 0,57 persen turun menjadi 0,00 persen di tahun 2020. Namun, penduduk yang melakukan persalinan ke dokter menurun dari 65,76 persen menjadi 64,05 persen di tahun 2020.

Penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih mengalami peningkatan yang sangat nyata diband-

ingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Terjadinya pergeseran dan perubahan penduduk yang berobat dari tenaga kesehatan yang kurang/ tidak terlatih/ tradisional menuju ke tenaga kesehatan yang terlatih secara medis memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah bahkan negara.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kota Sawahlunto, 2019-2020

Indikator	2019	2020
(1)	(3)	(4)
Rumah Sakit Pemerintah	19,20	13,72
Rumah Sakit Swasta	1,16	0,86
Praktek Dokter/Bidan	39,64	46,62
Klinik/Praktek Dokter Bersama	6,44	5,16
Puskesmas/Pustu	41,34	40,36
UKBM*	5,14	0,00
Praktek Pengobatan Tradisional	3,74	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber: Susenas, 2019-2020

Dari tabel 2.3 terlihat adanya peningkatan persentase penduduk yang berobat jalan ke Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter/Bidan, Klinik/Praktek Dokter Bersama, Puskesmas/Pustu yaitu dari 1,16 persen, 39,64 persen, 6,44 persen dan 41,34 persen di tahun 2019 menjadi 1,66 persen, 46,62 persen, 6,91 persen, dan 41,93 persen pada tahun 2019. Sedangkan penduduk yang memanfaatkan berobat ke Rumah Sakit Pemerintah turun dari 19,20 persen di tahun 2019 menjadi 10,47 persen di tahun 2020, selanjutnya UKBM dan Praktek Pengobatan Tradisional turun dari 5,14 persen dan 3,74 persen menjadi 0

^{*}UKBM terdiri dari Polindes, Poskesdes, Posyandu dan Balai Pengobatan

persen di tahun 2020.

Pemilikan jaminan kesehatan sangat diperlukan agar penduduk tidak mengalami kendala dalam mengakses fasilitas kesehatan, terutama kendala yang berkaitan dengan kendala biaya. Pemerintah Kota Sawahlunto mempunyai komitmen yang kuat dalam mendukung Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Program ini bertujuan mewujudkan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh masyarakat Kota Sawahlunto. Pelaksanaan program JPKM telah dimulai sejak tahun 2003 sampai tahun 2012. Namun tidak semua masyarakat Kota Sawahlunto yang memanfaatkan jaminan kesehatan yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat di Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan di Kota Sawahlunto, 2020

Indikator	2020
(1)	(2)
BPJS Kesehatan PBI	42,48
BPJS Kesehatan Non PBI	36,54
Jamkesda	0,49
Asuransi Swasta	1,09
Perusahaan/ Kantor	3,53
Tidak Memiliki	15,60

Sumber: Susenas, 2020

Dari tabel 2.4 terlihat bahwa keinginan masyarakat untuk menggunakan jaminan kesehatan pada tahun 2020 umumnya cukup tinggi. Jaminan kesehatan paling banyak yang digunakan masyarakat adalah BPJS PBI sebesar 43,35 persen, selanjutnya BPJS Non PBI sebesar 37,61 persen, perusahaan kantor 3,25 persen, asuransi swasta 2,77 persen dan Jamkesda sebesar 0,48 persen. Namun, sebanyak 13,47 persen penduduk belum memiliki jaminan kesehatan apapun.

Ntips: Ilsawahiintokota.bps.go.id

3

Dendidikan

Rata-rata Lama Sekolah 2021: 10,32 tahun



Penduduk Kota Sawahlunto rata-rata bersekolah selama 10,32 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA

29

Angka Partisipasi Murni Kota Sawahlunto, 2020



SD 99,38%



SMP 81,64%



SMA 77,30%

Ntips: Ilsawahiintokota.bps.go.id

PENDIDIKAN

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam beberapa tahun ke depan pembangunan pendidikan nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup:

- 1. Pemerataan dan perluasan akses,
- 2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,
- 3. Penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik,
- 4. Peningkatan pembiayaan.

Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

Kemampuan Baca Tulis dan Rata-rata Lama Sekolah

Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (*literacy rate*). Kata "melek huruf" dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Tabel 3.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Kemanpuan BacaTulis dan Angka Partisipasi Kasar di Kota Sawahlunto, 2019-2020

Indikator	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Kemampuan baca tulis		
Huruf Latin	99,50	99,67
Huruf Arab	12,60	6,01
Huruf Lainnya	0,16	0,77
Buta Huruf	0,50	0,33
Angka Partisipasi Kasar	100	
7-12	108,96	112,44
13-15	92,57	84,76
16-18	94,75	109,50

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2019-2020

Angka melek huruf dirasakan sudah jenuh untuk menggambarkan perkembangan tingkat pendidikan penduduk. Jika ada penduduk yang buta huruf pada umumnya berasal dari kelompok umur tua, sehingga sulit untuk mengupayakan agar penduduk tersebut dapat membaca atau menulis. Oleh karena itu diperlukan indikator lainnya yang menggambarkan perkembangan tingkat pendidikan penduduk seperti rata-rata lama sekolah atau angka partisipasi sekolah.

Rata-rata lama sekolah merupakan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Peningkatan rata-rata lama sekolah mengindikasikan perbaikan tingkat pendidikan penduduk.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Sawahlunto secara umum cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Sawahlunto adalah

10,32 tahun yang setara dengan kelas satu SMA.

10,4 10,32 10,3 10,2 10,1 10 9,94 9,93 9,92 9,9 9,8 9,7 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gambar 3.1 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto, 2016-2021

Sumber: Indikator IPM, 2016-2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah menjamin bahwa pada tahun 2030 semua anak, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk menilai pencapaian SDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat

untuk mengenyam pendidikan.

Penduduk usia 7-12 tahun yang sudah mengenyam bangku pendidikan dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami fluktuasi, dimana tahun 2018 sudah mencapai 100,00 persen dan turun menjadi 99,66 di tahun 2019 dan naik kembali menjadi 99,73 persen di tahun 2020. APS penduduk usia 13-15 tahun sebesar 97,44 persen pada tahun 2020, sehingga sebanyak 2,56 persen penduduk usia 13-15 tahun belum mengeyam pendidikan. Pada usia 16-18 tahun APS naik dari 81,79 persen di tahun 2019 menjadi 82,64 persen, artinya adanya 17,36 persen dari peduduk usia 16-18 yang belum pernah sekolah.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni di Kota Sawahlunto, 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)
Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
7 – 12 tahun	100	99,66	99,73
13 – 15 tahun	83,73	97,95	97,44
16 – 18 tahun	71,56	81,79	82,64
Angka Partisipasi Murni (APM)			
SD	100	99,66	99,38
SLTP	83,73	82,94	81,46
SLTA	71,56	70,86	77,30

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka, 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usian-ya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Secara umum, semakin tinggi tingkat pendidikan, APM semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya partisipasi penduduk dalam melanjutkan jenjang pendidikannya.

Secara umum APM SD mengalami penurunan dari 99,66 persen di tahun 2019 menjadi 99,38 persen, yang artinya ada 0,28 persen penduduk yang berusia 7-12 tahun belum mengenyam bangku Sekolah Dasar. Seperti halnya APS, semakin tinggi jenjang pendidikan APM juga semakin menurun. APM tingkat SMP sebesar 81,46 persen, menunjukkan penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMP sebesar 81,46 persen, dan APM tingkat SMA sebesar 77,30 persen.

Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tingkat kesejahteraan penduduk diharapkan semakin baik. Penduduk dengan tingkat pendidikan setara SMP berpeluang memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan penduduk yang berpendidikan SD atau dibawahnya. Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan setara SMP mencapai 21,15 persen. Berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa persentase penduduk laki-laki yang minimal menamatkan tingkat pendidikan setara SMP lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Tabel 3.3 Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Keatas di Kota Sawahlunto, 2020

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki	Wanita	Laki-laki + Wanita
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Mempunyai Ijazah	9,56	10,65	10,11
Tamat SD Sederajat	20,76	17,53	19,13
Tamat SMP Sederajat	21,92	20,40	21,15
Tamat SMA Sederajat	28,03	24,91	26,45
SMK	8,28	7,17	7,72
Dipoma I dan II	0,48	1,41	0,95
Diploma III	2,23	4,09	3,17
Diploma IV/S1/S2/S3	8,75	13,83	11,32
Jumlah	100	100	100

Sumber: Susenas, 2020

Dilihat menurut pendidikan tertinggi yang pernah di tamatkan, sebagian besar penduduk Kota Sawahlunto memiliki pendidikan setara SMA sederajat dengan persentase mencapai 26,45 persen. Persentase penduduk yang menamatkan perguruan tinggi masih relatif kecil, yaitu hanya sebesar 11,32 persen. Penduduk yang tidak memiliki ijazah masih tergolong tinggi yaitu sebesar 10,11 persen.

Jika dibanding menurut jenis kelamin terlihat persentase penduduk laki-laki yang memiliki ijazah tertinggi SD hingga SMK lebih tinggi dari pada perempuan, namun memasuki jenjang pendidikan yang lebh tinggi (Diploma ke atas) persentase perempuan yang memilikinya lebih besar dibandingkan laki-laki.

Ntips: Ilsawahiintokota.bps.go.id



Ketenagakerjaan

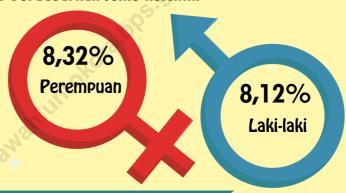


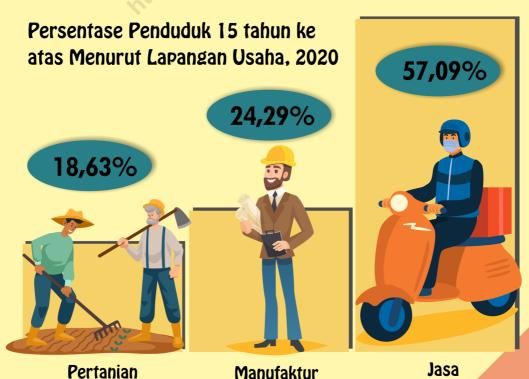
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kota Sawahlunto tahun 2020 sebesar

8,20%

TPT berdasarkan jenis kelamin





Ntips: Ilsawahiintokota.bps.go.id

KETENAGAKERJAAN

4

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, dimana masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Berbagai masalah bidang ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah antara lain tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha, persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih dan persentase pekerja anak.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPAK merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting dan digunakan untuk menganalisa serta mengukur capaian hasil pembangunan. Partisipasi angkatan kerja juga dapat diukur dengan TPAK yang berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu negara. Nilai TPAK yang terus meningkat menan-

dakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (*labour supply*) semakin banyak.

TPAK berfluktuatif dari 72,63 persen pada 2017 turun menjadi 69,20 persen pada 2019, kemudian naik kembali menjadi 70,57 persen di kondisi Agustus 2020. Penurunan TPAK ini merupakan indikasi menurunnya kecenderungan penduduk ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan penduduk perempuan keluar dari angkatan kerja disebabkan mengurus rumah tangga.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto (Persen), 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Partisipasi Angkatan Ker	·ja		
Laki-laki	82,97	80,82	81,89
Perempuan	62,61	57,82	59,50
Laki-laki+Perempuan	72,63	69,20	70,57
Tingkat Pengangguran Terbuka			
Laki-laki	6,37	6,22	8,12
Perempuan	4,96	7,64	8,32
Laki-laki+Perempuan	5,75	6,82	8,20

Sumber: Sakernas, 2018-2020

Tingkat pengangguran terbuka tahun dari tahun 2018 sampai 2020 cenderung naik dari 5,75 persen pada tahun 2018 menjadi 8,20 persen di tahun 2020. Kenaikan angka TPT ini terkait dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan lapangan kerja semakin sedikit, sehingga lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja. Selain itu, juga terkait dengan tidak cukupnya jumlah lapangan kerja atau tidak adanya keahli-

han dari pencari kerja untuk memenuhi lapangan kerja tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pendidikan

Harapan setiap individu adalah mudah mendapatkan pekerjaan layak, sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada makin tinggi harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Tidak sedikit juga dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, sehingga sebagian dari mereka banyak yang menjadi pengangguran.

Secara umum pada Tabel 4.2 tampak bahwa persentase penduduk yang menganggur paling besar pada jenjang pendidikan SMK dan SMA diikuti oleh jenjang pendidikan minimal SD dan Pergguruan tinggi masing-masing 757, 620, 476 dan 314 orang. Pemerintah masih harus membuat terobosan untuk menekan bertambahnya jumlah pengangguran terdidik terutama dalam bidang kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan penduduk terdidik Kota Sawahlunto yang dirasa masih cukup lemah.

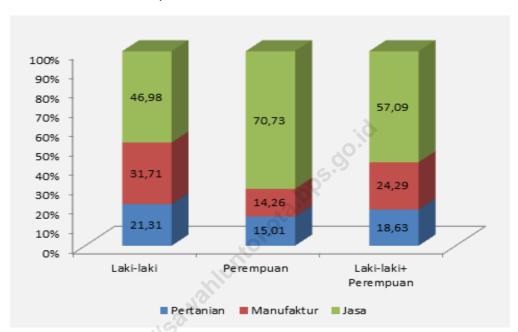
Tabel 4.2 Penduduk 15 tahun ke Atas yang Termasuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Sawahlunto, 2020

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Minimal SD/MI	325	151	476
SMP/Tsanawiyah	151	135	286
SMA/Aliyah	335	285	620
SMK	390	367	757
Diploma I/II/III	169	87	256
Universitas/S1/S2/S3	168	146	314
Total	1538	1171	2709

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka, 2021

Lapangan Usaha

Berbeda dengan tahun sebelumnya distribusi penduduk ditampilkan menurut lapangan pekerjaan utama, yang dibagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok lapangan pekerjaan utama pertanian, lapangan pekerjaan utama manufaktur dan lapangan pekerjaan utama jasa.



Gambar 4.1 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Sawahlunto, 2020

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka, 2021

Secara umum penduduk Kota Sawahlunto yang bekerja mayoritas berada pada kelompok lapangan pekerjaan utama jasa sebesar 57,09 persen, diikuti sektor manufaktur (24,29 persen) dan pertanian (18,63 persen). Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan yang bekerja di lapangan pekerjaan utama jasa, lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sedangkan pada lapangan pekerjaan utama manufaktur dan pertanian persentase laki-laki lebih tinggi disebabkan jenis pekerjaan pada lapangan pekerjaan ini membutuhkan kekuatan fisik. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengolah bahan baku, suku cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual.

Dari tabel 4.3 Berdasarkan persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang menurut Status Pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai lebih dominan yaitu sebesar 42,25 persen diikuti status pekerjaan pertanian sebesar 25,87 persen. Sedangkan status pekerjaan bebas di pertanian lebih kecil dari yang lainnya yaitu 2,19 persen.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan di Kota Sawahlunto, 2020

Kode	Status Languagen Healta	Jenis Ke	elamin	Total
Kode	Status Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	iotai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Berusaha sendiri	27,18	24,11	25,87
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	10,16	14,65	12,07
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	2,76	0,60	1,84
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	43,40	40,70	42,25
5	Pekerja bebas di pertanian	2,29	2,05	2,19
6	Pekerja bebas non pertanian	9,08	1,78	5,97
7	Pekerja keluarga	5,13	16,11	9,81
	Total	100	100	100

Sumber: Sakernas, 2020

5

Taraf & Dola Konsumsi

Indeks Gini Ratio Kota
Sawahlunto 2020 0,3
naik 0,011 dari 2019

berarti:

ketimpangan antar kelompok semakin besar dari tahun sebelumnya



Pengeluaran rata-rata per kapita/bulan di Kota Sawahlunto tahun 2021

Makanan **Rp 694.459,-**





Bukan Makanan

Rp 683.978,-

Ntips: Ilsawahiintokota.bps.go.id

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi penduduk juga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Hal ini terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, begitupula sebaliknya permintaan akan barang bukan makanan pada umumnya meningkat atau tinggi.

Dari segi budaya, pergeseran ini dikhawatirkan menjadi pertanda bahwa masyarakat semakin menyukai hal-hal yang bersifat instan dan praktis. Selain itu, dari segi keamanan pangan, ada beberapa isu yang harus menjadi perhatian. Makanan jadi banyak digemari karena kepraktisannya. Namun di sisi lain teknologi pangan akan menyebabkan semakin tumbuhnya kekhawa-

tiran akan tingginya resiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi.

Jumlah dan persentase penduduk miskin adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan pendapatan penduduk yang meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin memberi indikasi menurunnya pendapatan penduduk.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel 5.1 Perkembangan Pengeluaran Rata-rata Perkapita/Bulan di Kota Sawahlunto, 2019-2021

Jenis Pengelu-	N	Nominal (Rp)			(%)	
aran	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan	601.359	648.425	694.459	50,27	47,84	50,38
Bukan Makanan	594.998	706.917	683.978	49,73	52,16	49,62
Perumahan	255.400	282.506	295.728	21,35	20,84	21,45
Barang dan Jasa	137.397	157.808	157.722	11,48	11,64	11,44
Pakaian	50.692	58.390	46.033	4,24	4,31	3,34
Barang Tahan Lama	66.746	128.105	105.078	5,58	9,45	7,62
Lainnya	84.764	80.109	11.563	7,09	5,91	0,84
Jumlah	1.196.357	1.355.343	1.378.437	100	100	100

Sumber: Susenas, 2019-2021

Tabel 5.1 memperlihatkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2019-2021 penduduk meningkat dari Rp1.196.357,- menjadi Rp.1.355.343,- dan Rp.1.378.437,- pada 2021. Persentase pengeluaran untuk makanan memperlihatkan adanya penurunan yaitu dari 50,27 persen menjadi 47,84 persen pada tahun 2020, dan kemudian naik kembali pada tahun 2021 menjadi 50,38. Dan sebaliknya persentase untuk pengeluaran bukan makanan meningkat dari 49,73 persen pada tahun 2019 menjadi 52,16 persen di tahun 2020 dan turun menjadi 49,62 pada 2021. Ini mengindikasikan pengeluaran makanan menjadi prioritas pada 2021. Pengeluaran pada kelompok bukan makanan mengalami penurunan pada semua jenis pengeluaran di tahun 2021, kecuali pengeluaran perumahan dan pakaian yang justru mengalami penurunan dari tahun 2020.

Untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan penduduk digunakan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia, yaitu dengan melihat persentase pengeluaran yang mampu dibelanjakan oleh kelompok 40 persen penduduk yang berpengeluaran paling rendah, 40 persen penduduk berpengeluaran sedang, dan 20 persen penduduk berpengeluaran tinggi. Disamping kriteria yang ditetapkan Bank Dunia ada indikator lain yang juga sering digunakan yaitu Indeks Rasio.

Tabel 5.2 Distribusi Pengeluaran Penduduk per Kapita di Kota Sawahlunto (Persen), 2019-2021

Colongon Bongolyaran	Tahu	n
Golongan Pengeluaran	2019 2020	
(1)	(2)	(3)
40% Terendah	2,75	22,27
40% Menengah	38,48	38,18
20% Tertinggi	38,77	39,55

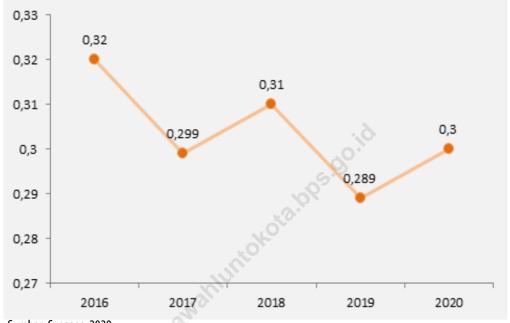
Sumber: Susenas, 2019-2021

Secara umum mengukur ketimpangan yang pertama dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk miskin. Selanjutnya dapat diukur dengan melakukan perbandingan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang kaya. Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk miskin menerima diatas 17 persen pendapatan nasional.

Menurut Hudiyanto (2014), derajat ketimpangan pendapatan berdasarkan distribusi ukuran yaitu:

- **Tingkat ketimpangan berat,** apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
- **Tingkat ketimpangan sedang**, apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional.
- Tingkat ketimpangan ringan, apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima diatas 17 persen dari pendapatan nasional.

Sementara itu untuk koefisien indeks gini, tidak menunjukkan perubahan, meskipun pendapatan penduduk cenderung naik turun, namun indeks gini tetap berapa pada kisaran 0,28 hingga 0,32 dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 naik menjadi 0,3 bila dibandingkan tahun 2019 yaitu 0,289 yang menunjukkan ketimpangan antar kelompok semakin besar dari tahun sebelumnya.



Gambar 5.1 Indeks Gini Ratio Kota Sawahlunto, 2016-2020

Sumber: Susenas, 2020

Golongan Pengeluaran

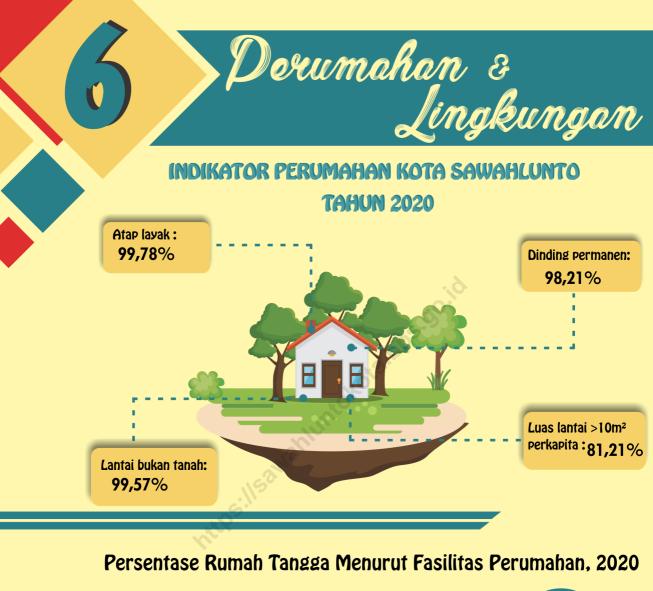
Golongan pengeluaran penduduk dibagi atas 6 (enam) golongan yaitu penduduk yang golongan pengeluran terendah yaitu kurang dari 299.000,, penduduk yang golongan pengeluran 300.000 - 499.999,- penduduk yang golongan pengeluran 500.000 – 749.999, penduduk yang golongan pengeluaran 750.000- 999.999,- penduduk yang golongan pengeluran 1.000.000 – 1.499.999,- dan peduduk yang golongan pengeluran tertinggi yaitu 1.500.000 lebih.

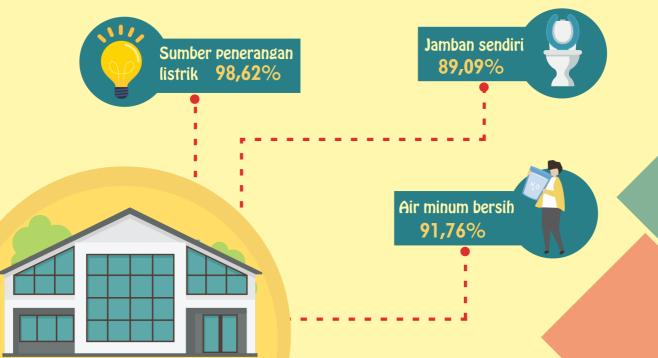
Tabel 5.3 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kota Sawahlunto,2020

Golongan Pengeluaran Perkapita Sebular (Rp)	2020
(1)	(2)
<=299.999	0,00
300.00-499.999	3,07
500.000-749.999	13,50
750.000-999.999	25,86
1.000.000-1.499.999	28,78
>1.500.000	28,79
Jumlah/Total	100,00

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka, 2021

Tabel 5 menyajikan data mengenai persentase penduduk menurut golongan pengeluaran. Tidak ada penduduk pada golongan pengeluaran terendah (kurang dari Rp 299.999) dan golongan terendah kedua sebanyak 3,07 persen. Persentase penduduk dengan golongan pengeluaran lebih dari Rp 1.500.000 tercatat paling banyak yakni 28,79 persen dan diikuti oleh golongan pengeluaran Rp1.000.000-Rp1.499.999 sebanyak 28,78 persen.





Ntips: Ilsawahiintokota.bps.go.id

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

6

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu, rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal memengaruhi status kesehatan penghuninya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Kualitas Rumah Tinggal

Salah satu kualitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah adalah kualitas material seperti jenis atap, lantai dan dinding terluas yang digunakan, termasuk fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Rumah tinggal dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila sudah memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tinggal tersebut.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Perumahan di Kota Sawahlunto, 2019-2020

Indikator Perumahan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Lantai bukan tanah	99,62	99,57
Atap layak *)	100	99,78
Dinding permanen **)	97,02	98,21
Luas lantai >=10 m² perkapita	74,96	81,21

Sumber: Susenas 2019-2020

Dari data Susenas 2019 dan 2020, persentase rumah tangga yang berlantaikan bukan tanah hampir mencapai 100 persen yaitu 99,57 di tahun 2020, artinya jarang ditemukan rumah berlantaikan tanah di Kota Sawahlunto. Kondisi yang sama juga terjadi pada bangunan rumah tangga yang menggunakan atap terluas. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebu-

^{*}Atap layak: Atap seng, beton. genteng, sirap dan asbes

^{**} Dinding permanen: Dinding tembok dan kayu

tuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian dan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m² (BPS, 2001).

Berdasarkan data Susenas 2019-2020 persentase rumah tangga dengan luas lantai perkapita di atas 10 m^2 pada tahun 2019 mencapai 74,96 persen dan naik di tahun 2020 menjadi 81,21 persen.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas rumah tinggal, seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2020 telah mencapai 91,76 persen. Gaya hidup penduduk dalam mengkonsumsi air minum juga telah banyak berubah. Dari tabel terlihat rumah tangga di Kota Sawahlunto yang mengkonsumsi air kemasan, air isi ulang dan ledeng mencapai 73,43 persen di tahun 2019 dan naik menjadi 78,84 persen di tahun 2020.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan di Kota Sawahlunto, 2019-2020

Fasilitas Perumahan –	Tahun		
Fasilitas Perumanan —	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	
Air kemasan, air isi ulang dan ledeng	73,43	78.84	
Air minum bersih	84,78	91,76	
Jamban sendiri	86,26	89,09	
Jamban sendiri dengan tangki septik	90,06	87,82	
Sumber penerangan listrik	98,73	98,62	

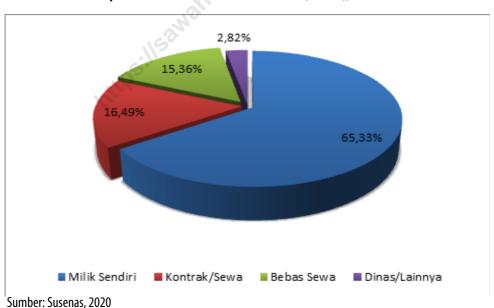
Sumber: Susenas, 2019-2020

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2020, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tengki septik mencapai 87,82 persen atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 (90,06 persen).

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Di Kota Sawahlunto rumah tangga yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik dalam dua tahun terakhir sudah hampir mencapai 100 persen yaitu 98,73 persen di tahun 2019 dan 98,62 persen di tahun 2020.

Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.



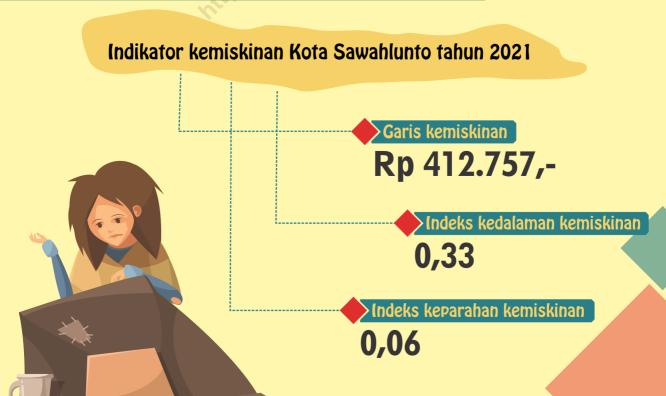
Gambar 6.1 Status Kepemilikan Rumah di Kota Sawahlunto (Persen), 2020

Berdasarkan hasil Susenas 2020, rumah tangga di Kota Sawahlunto yang menempati rumah milik sendiri hanya sebesar 65,33 persen, kemudian sebanyak 16,49 persen adalah rumah kontrak/sewa. Rumah tangga yang menempati rumah bebas sewa di Kota Sawahlunto yaitu 15,36 persen. Cukup tingginya rumah kontrak/sewa dan rumah bebas sewa dimungkinkan karena harga jual tanah di Kota Sawahlunto cukup tinggi, sehingga penduduk banyak yang mengontrak, sewa atau menempati rumah milik orang tua/saudara.

Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin Kota Sawahlunto





Ntips: Ilsawahiintokota.bps.go.id

KEMISKINAN

Masalah kemiskinan merupakan persoalan pokok bangsa Indonesia yang selalu menjadi prioritas pemerintah dan menjadi agenda rutin dalam Rencana Pembangunan Nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan yang cenderung menurun secara melambat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa strategi penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal. Hal ini tergambar dari belum meratanya pembangunan antar daerah di Indonesia. Meskipun demikian, permasalahan kemiskinan memang tidak dapat teratasi dengan mudah, karena kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya mencakup sisi ekonomi, tetapi juga sisi sosial dan budaya. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melaui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak di Indonesia, tidak cukup hanya dari pemerintah, tetapi juga dari lembaga penelitian, sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (World bank).

Perkembangan Penduduk Miskin

Secara umum, persentase penduduk miskin terhadap jumlah seluruh penduduk Kota Sawahlunto menunjukkan tren di seputar angka 2 persen. Tingkat kemiskinan naik sebesar 0,22 persen pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel 7.1, adanya peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 hingga 2021 yaitu 1,35 ribu menjadi 1,36 ribu,

dan kemudian naik menjadi 1,52 ribu di tahun 2021.

Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Sawahlunto, 2016-2021

Tahun	Jumlah penduduk miskin (Ribu)	Persentase penduduk miskin (%)
(1)	(2)	(3)
2016	1,34	2,21
2017	1,23	2,01
2018	1,48	2,39
2019	1,35	2,17
2020	1,36	2,16
2021	1,52	2,38

Sumber: BPS Kota Sawahlunto

Suatu penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin berdasarkan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah GK. Oleh karena itu, nilai GK berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada suatu waktu. Selama periode 2018-2020, Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2018 Rp354.665,- menjadi Rp374.615,- di tahun 2019, kemudian Rp399.688,- di tahun 2020 dan Rp412.757,- di tahun 2021.

Tabel 7.2 Beberapa Indikator Penduduk Miskin di Kota Sawahlunto, 2018-2021

Indikator	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Garis Kemiskinan (Rupiah)	354.665	374.615	399.688	412.757
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,27	0,23	0,07	0,33
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,07	0,05	0,00	0,06

Sumber: BPS Kota Sawahlunto

Selain GK, rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan perlu diperhatikan. Ukuran untuk mengukur kesenjangan pengeluaran disebut sebagai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Berdasarkan tabel 7.2, nilai P1 pada tahun 2018 dari 0,27 turun menjadi 0,23 di tahun 2019 dan pada tahun 2020 turun kembali menjadi 0,07 persen, sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi 0,33. Naiknya nilai P1 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Semakin tinggi nilai P1 berdampak pada semakin sulitnya penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Ukuran lainnya untuk melihat kondisi kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Selama 2018-2020, nilai P2 juga menunjukkan penurunan, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, nilai P2 sebesar 0,06 naik dari tahun sebelumnya yaitu 0,00. Semakin tinggi nilai P2 mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi.

Ntips: Ilsawahiintokota.bps.go.id



Sosial Lainnya



Pada tahun 2020, penduduk >5 tahun yang mengakses internet sebanyak 55,30%





/ 1,4 1%
penduduk >5 tahun
memiliki/menguasai
telepon seluler

25,31 % rumah tangga memiliki komputer/laptop



Ntips: Ilsawahiintokota.bps.go.id

SOSIAL LAINNYA

Globalisasi telah mendorong perubahan pola hidup masyarakat. Teknologi yang semakin canggih seolah membuat akses dunia tanpa batas. Tingkat kebutuhan mulai mengalami pergeseran, dari kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer, seperti berlibur atau berwisata, eksistensi di tengah masyarakat, dan mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran informasi yang cepat antar daerah dan negara menjadi kebutuhan utama yang tidak terhindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup orang banyak.

Tabel 8.1 Persentase Indikator Sosial Lainnya di Kota Sawahlunto, 2018-2020

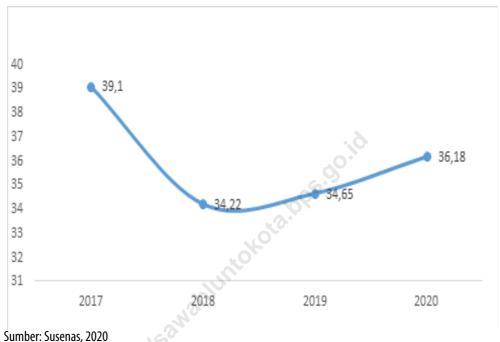
No	Indikator		Tahun	
No Indikator	indikator	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan	0,34	0,47	0,99
2.	Persentase rumah tangga penerima kredit usaha	34,65	34,22	36,18
3.	Persentase rumah tangga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Sejahtera (KKS)	2,81	2,12	1,95

Sumber: Susenas, 2018-2020

Penerima Kredit Usaha

Kredit usaha pada umumnya diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bantuan modal dan pembiayaan bagi usaha produktif. Kredit usaha umumnya diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), modal ventura, Program Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), pegadaian, dan sebagainya. Dalam SUSENAS, kredit usaha bisa berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Bank selain KUR, KUBE/KUB, program koperasi, perorangan (dengan bunga), dan lainnya.

Tahun 2018, persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha cukup besar yaitu sebesar 34,65 persen kemudian menurun sedikit menjadi 34,22 persen di tahun 2019 dan tahun 2020 naik kembali menjadi 36,18 persen. Kredit usaha sangat bermanfaat terutama bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro dalam menopang perekenomian Kota Sawahlunto. Kenaikan persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha menggambarkan minat masyarakat semakin meningkat untuk memperoleh kredit usaha, terutama dari lembaga keuangan atau bank.



Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha di Kota Sawahlunto, 2017-2020

Sumber: Susenas, 2020

Pada periode 2017-2020, rumah tangga penerima kredit usaha di Kota Sawahlunto befluktuatif. Terjadi peningkatan pada tahun 2017, namun mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2018 dan tahun 2019, kembali mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2020. Jika dibandingkan persentase penerima kredit usaha pada tahun 2020 dengan 2017, terjadi penurunan sebesar 2,92 persen. Yaitu sebesar 39,10 persen pada tahun 2017 turun menjadi 36,18 persen pada tahun 2020. Dengan banyaknya orang yang berusaha di Kota Sawahlunto, memungkinkan penerima kredit usaha mengalami peningkatan.

Tindak Kejahatan

Keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan rakyat. Rasa aman dari tindak kejahatan menjadi salah satu indikator pendukung yang mencerminkan rakyat sejahtera dan menjadi salah satu aspek penyusun Indeks Kebahagiaan Indonesia oleh BPS tahun 2014. Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan (BPS). Tindak kejahatan atau kriminalitas umumnya terjadi sebagai akibat dari kesenjangan sosial dan ekonomi suatu negara, serta bisa bersumber dari faktor politik.

Tahun 2018, persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan di Kota Sawahlunto sebesar 0,34 persen. Angka ini naik menjadi 0,47 persen di tahun 2019 dan naik kembali pada tahun 2020 menjadi 0,99 persen. Jenis kejahatan yang dialami dapat berupa pencurian, perampokan, pembunuhan, penipuan, perkosaan, dan lainnya. Penurunan jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan dapat dipandang sebagai suatu hal yang terjadi seiring dengan penurunan tindak kejahatan.

Akses Pada Teknologi Komunikasi dan Informasi

Di era informasi saat ini, kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur dan akses Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong pergerakan sektor ekonomi. Tantangan pembangunan dari suatu negara besar seperti Indonesia adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur membantu konektivitas antar wilayah satu dengan wilayah lain secara cepat dan luas. Di

samping pembangunan secara fisik, pembangunan jalur transportasi dan TIK juga penting sebagai salah satu infrastruktur konektivitas.

Kemajuan di bidang teknologi informasi memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Potensi TIK jika dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pembangunan nasional, TIK berperan serta menciptakan lapangan pekerjaan, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan kemampuan masyarakat. Semakin banyak penduduk yang memiliki akses TIK dan terus mengikuti kemajuan teknologi, maka dapat dipastikan kesejahteraan penduduk akan semakin meningkat.

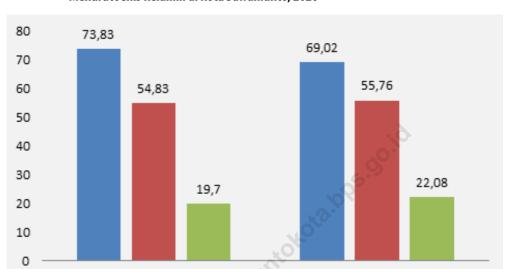
Persentase rumah tangga yang memiliki komputer/laptop berfluktuasi dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2020, rumah tangga yang memiliki komputer/laptop mengalami penurunan yaitu 25,31 persen dari tahun 2019 yaitu 28,78 persen.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas yang Memiliki/Menguasai Teknologi Informasi di Kota Sawahlunto, 2020

Alat Komunikasi dan Informasi	Tahun			
Alat Komunikasi dan Informasi —	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Telepon selular	72,27	73,06	71,41	
Akses internet	40,72	49,38	55,30	
Rumah tangga yang memiliki kom- puter/laptop	27,63	28,78	25,31	

Sumber: Susenas, 2018-2020

Persentase penduduk yang mengakses internet meningkat dari 49,38 persen di tahun 2019 menjadi 55,30 persen di tahun 2020. Persentase penduduk yang mempunyai akses telepon seluler tahun 2020 sebesar 71,41 persen atau menurun 1,65 persen dibanding tahun 2019.



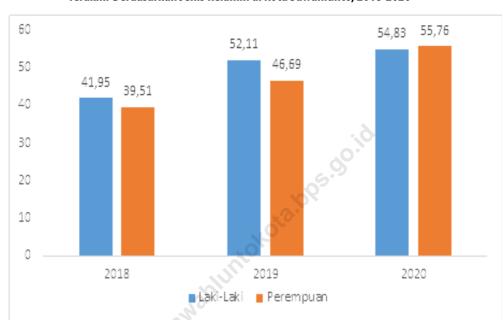
Perempuan

Gambar 8.2 Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas yang Memakai dan Akses Teknologi Informasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto, 2020

Sumber: Susenas, 2020

Laki-laki

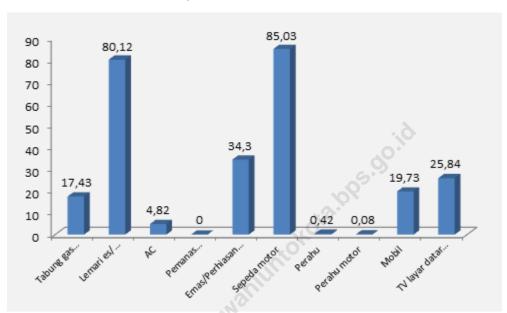
Seiring perkembangan arus informasi yang mengalir deras, masyarakat juga semakin membutuhkan media atau sarana yang dapat menunjang aktivitasnya sehari-hari, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun hiburan. Oleh sebab itu, para vendor telepon seluler berlomba-lomba menguasai pangsa pasar dengan melihat antusiasme masyarakat yang cukup besar untuk memiliki telepon seluler yang sesuai dengan kebutuhannya.



Gambar 8.3 Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke atas yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto, 2018-2020

Sumber: Susenas, 2018-2020

Apabila dibedakan berdasarkan jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan mereka untuk mengakses internet, walaupun persentase perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki pada tahun 2020 yaitu sebanyak 55,76 persen, sedangkan persentase laki-laki mencapai 54,83 persen. Hal ini menggambarkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang hampir sama terhadap internet dengan berbagai sarana yang digunakan.



Gambar 8.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Barang dan Jenis Barang yang dimiliki di Kota Sawahlunto, 2020

Sumber: Susenas, 2020

Gambar 8.4 dapat dilihat rumah tangga yang memiliki sepeda motor, lemari es dan emas perhiasan minimal 10 gram mendominasi dari barang yang dimiliki barang berdasarkan dari jenis barangnya, yaitu masing-masing sebesar 85,03, 80,12 dan 34,3 persen.



DATA MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SAWAHLUNTO

Jl. Bagindo Aziz Chan Sawahlunto 27417 Telp/Fax (0754) 61049 Email : bps1373@bps.go.id Homepage : http://sawahluntokota.bps.go.id

